

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang Kemiskinan berarti berbicara tentang Harkat dan Martabat Manusia. Hal ini berarti, kemiskinan merupakan topik yang sangat penting dan krusial. Oleh karena itu tidaklah heran jika banyak pihak sering menjadikan kemiskinan sebagai topik kajian dalam berbagai kesempatan, seperti diskusi, seminar, workshop, dan media lainnya. Kemiskinan telah lama menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan tetaplah menjadi satu program prioritas dan strategi lintas bidang di Indonesia. Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat.

Peraturan Presiden RI no 13 tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. Mengatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara

layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Panjang dan kesepakatan Global (dunia) untuk mencapai tujuan pembangunan Millenium.

Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi dan juga lowongan pekerjaan. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Rendahnya penghasilan satu keluarga sangat miskin menyebabkan anggota keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian maka si anak tidak dapat mencicipi pendidikan yang di butuhkan dalam kehidupannya, sedangkan pemeliharaan kesehatan bagi ibu yang sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan ada yang mengalami kematian. Anak-anak keluarga miskin juga banyak yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah karena harus bekerja membantu mencari nafkah dalam keluarga, masalah ini harus segera ditangani dan ditanggulangi.

Mengatasi kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam-macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah dan

masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Begitu pula kemiskinan yang terjadi di desa Sukandebi menurut penulis disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya ialah disebabkan adanya masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani, tetapi dengan kondisi semacam ini tidak lantas membuat para masyarakat berputus asa dan menyerah, dengan segenap pengetahuan dan kemampuannya para petani terus berusaha untuk melakukan strategi bertahan hidup yang tepat seperti menyewa lahan/tanah milik pengusaha ataupun tuan tanah di Desa Sukandebi. Ada juga yang ambil inisiatif lain seperti membuka usaha kecil-kecilan untuk bertahan hidup ataupun ikut bekerja ke ladang masyarakat lain untuk memperoleh sebuah upah. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan di Desa Sukandebi dan mengetahui tindakan yang akan dilakukan Pemerintah Desa Desa Sukandebi dalam mengatasi kemiskinan.

Lalu kemiskinan yang ada di Sukandebi secara perlahan sudah dapat ditangani melalui program-program penanggulangan dari pemerintah mulai kembali ke tahap dimana kondisi kemiskinan menjadi meningkat diakibatkan oleh adanya virus covid-19, misalnya masyarakat merasakan terbatas saat bekerja ataupun hasil dari ladang harganya berkurang tetapi harga bibit tani malah naik.

Ada tiga dampak besar pandemi Covid ini bagi perekonomian nasional yang tentunya berdampak juga bagi desa Sukandebi. Dampak yang pertama yaitu, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli, sehingga mempengaruhi harga nilai atau pasar hal ini tentu dapat dirasakan oleh para pedagang kecil dari masyarakat.

Dampak kedua yaitu bahwa pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat baik dalam pembelian barang, ataupun harga dari barang yang tidak memiliki peningkatan disaat pandemi ini.

Lalu menurut pendapat si penulis dampak Covid-19 yang terjadi di Desa Sukandebi selain menimbulkan kondisi ekonomi yang membuat kemiskinan meningkat dampak lain adalah bagi pendidikan dan juga kerohanian, bagi pendidikan misalnya terhambatnya metode belajar tatap muka yang membuat siswa baik dari jenjang Tk-Mahasiswa mengalami kesusahan dalam belajar, ditambah dengan kekuatan sinyal yang kurang memadai, acara kerohanian seperti kegiatan ibadah kegereja dibatasi bahkan untuk sekarang gereja di desa Sukandebi di tutup akibat Covid-19. Selain itu juga Petani yang biasanya pergi keluar untuk memberikan / mencari nafkah keluar desa untuk dimasa Covid-19 ini masyarakat lebih memilih tinggal di Desa Sukandebi daripada mengambil resiko diluar desa, ini lah salah satu yang membuat ekonomi desa ini berkurang. Kemudian untuk bagian kesehatan masyarakat memiliki kendala juga dikarenakan protokol serta susah nya proses pengobatan dan pikiran masyarakat yang takut dengan virus ini sehingga memilih untuk berobat ke klinik terdekat.

Desa Sukandebi merupakan desa yang berada di kecamatan tigalingga , Kabupaten Dairi yang dikelilingi oleh perkebunan warga dan juga desa ini berada di tengah-tengah desa lainya yang berada di Kecamatan Tigalingga.

Desa Sukandebi berbatasan langsung dengan desa lain yang hanya dibatasi oleh lahan pertanian / perkebunan warga , sebelah barat berbatasan dengan desa lain yaitu desa lau kinapan , sebelah selatan berbatasan dengan desa tanjung , sebelah utara berbatasan dengan desa laumil , dan sebelah timur berbatasan dengan desa lau bagot , dan masing-masing dipisahkan oleh lahan perkebunan warga.

Berdasarkan pengamatan yang diperhatikan oleh si penulis , adapun permasalahan yang diamati sipenulis adalah adanya kekecewaan diantara masyarakat yang dianggap tidak tepat sasaran serta adanya kejanggalan bantuan kemiskinan yang menimbulkan kesalahan bagi masyarakat yang mana masyarakat menganggap bahwa program penanggulangan kemiskinan itu sebagai seperti gaji bulanan dari pemerintah yang membuat sebahagian masyarakat malas untuk bekerja diakibatkan bantuan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja program yang dibuat untuk mengatasi kemiskinan di desa Sukandebi ?
2. Apakah program dalam menanggulangi kemiskinan desa Sukandebi program yang dijalankan transparan dan juga tepat sasaran?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu untuk

mengetahui :

1. Untuk mengetahui Tepat dan Transparansinya program kerja pemerintah Desa Sukandebi dalam mengatasi kemiskinan.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan di desa sukandebi dan sejauh mana tingkat keberhasilan dari program tersebut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang implementasi kebijakan melalui program kerja untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian kedepan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana Administrasi Publik di Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bagi Pemerintah Desa Sukandebi sebagai pertimbangan dalam pembuatan ataupun penyusunan program program dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukandebi.
- c. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa FISIPOL khususnya jurusan Administrasi Publik.

- d. Bagi masyarakat umum guna menambah wawasan dalam pelaksanaan program kerja penanggulangan kemiskinan desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori kemiskinan**

Mecher (2019) mengemukakan, kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.

Pearce (2019) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dan interaksi teknologi, SDA dan modal, dengan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam hal ini kemiskinan itu merupakan interaksi yang tidak seimbang atau interaksi yang bersifat timpang diantara berbagai elemen yang ada dalam suatu ekosistem, sehingga pada gilirannya berdampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Castells (2019) mengemukakan kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standard kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup. Adapun standard kebutuhan minimum dimaksud pada umumnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan. Cara ini ditempuh karena kebutuhann pokok makan inilah yang mengakibatkan sekaligus merupakan sumber dari manusia untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan pekerjaan.

Menurut Amarta sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena multidimensional.

Menurut BPS (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran 11 kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan. Yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang di hasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang di hitung dalam 2.100 kalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Haughton dan Shahidur (2012:3) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Kemiskinan merupakan kondisi absolute dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh sebagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenal dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang

menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

### **2.1.1 Jenis-jenis kemiskinan**

Jenis kemiskinan dalam buku kemiskinan dan solusi matias siagian (2019) terbagi atas:

#### **a. Kemiskinan Massa**

Secara sederhana kemiskinan massa dapat diartikan sebagai kemiskinan yang dialami secara massal penduduk dalam suatu lingkungan wilayah. Hal ini berarti, terdapat demikian banyak orang yang secara faktual tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimumnya sehingga terpaksa hidup serba kekurangan, serta mengalami kondisi hidup yang tidak layak jika dilihat dari segi harkat dan martabat manusia. Kemiskinan massa biasanya terjadi disebabkan daya dukung wilayah terhadap kehidupan manusia di wilayah tertentu yang tidak memadai.

#### **b. kemiskinan non massa**

Secara umum kemiskinan non massa adalah lawan dari kemiskinan massa. Hal ini berarti, bahwa kondisi wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah yang menghadapi masalah kemiskinan massa secara umum berbeda dengan kondisi wilayah diidentifikasi tidak menghadapi masalah

kemiskinan massa atau kemiskinan non massa. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kemiskinan non massa adalah kemiskinan yang dihadapi oleh segelintir orang.

c. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah ditemukan jika kajian tentang kemiskinan itu didasarkan atas faktor-faktor penyebab kemiskinan itu terjadi. Dalam hal ini kemiskinan yang terjadi sebagai kemiskinan yang terjadi sebagai konsekuensi dari alam dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut bermukim. Sebagai contoh, daerah dimana mereka tinggal adalah daerah yang lahannya tandus, berbatu-batu, tidak memiliki bahan-bahan mineral atau barang tambang, tidak luas dan tidak memiliki perairan yang menjadi tempat hidupnya berbagai jenis ikan.

d. Kemiskinan Kultural

Kasus lain berlaku pada konsep kemiskinan kultural atau kemiskinan budaya. Dalam kasus ini, budaya di indentifikasi sebagai actor penyebab terjadinya kemiskinan tersebut. Sangat banyak pendapat yang berkenaan dengan kemiskinan budaya. Hal mana merupakan konsekuensi logis dari fakta, bahwa membicarakan budaya sesungguhnya kita telah memasuki wilayah dengan unsur-unsur yang sangat sensitif dan sangat berpeluang menimbulkan polemik. Dalam kasus kemiskinan yang ditimbulkan budaya masyarakat, biasanya kemiskinan itu kurang disadari sebagai suatu masalah. Sebaliknya,

justeru masyarakat yang melihat dan mengetahui kondisi hidup mereka yang lebih menyadari keberadaan kemiskinan mereka.

e. Kemiskinan Terinvolusi

Kemiskinan terinvolusi merupakan bentuk dan kondisi khusus dari kemiskinan kultural. Ciri khusus dari kemiskinan terinvolusi adalah telah terinternalisasinya nilai-nilai negatif dalam diri seseorang atau sekelompok orang dalam memandang diri dan kehidupannya, sehingga mereka menganggap kehidupan dengan segala kondisinya sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah.

Kemiskinan menurut Arsyad, (2010) kemiskinan di bagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Menurut Sujogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standart kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang buat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Kemiskinan adalah tidak tercapainya kebutuhan primer seperti kelaparan, sakit yang berkepanjangan karena ketiadaan biaya untuk pengobatan, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan jadi pengemis. Menurut pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan menurut tadjuddin, yang membagi kemiskinan

dari beberapa aspek dengan variasi yang berbeda, yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan politik, dan kemiskinan sosial.

a. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang sumber daya yang dimaksudkan, bukan hanya membalas masalah finansial saja. Melainkan meliputi masalah kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas maka kemiskinan yang diukur dari kekayaan secara lain dapat dengan standart baku yang dikenal dengan sebutan garis kemiskinan (poverty line) atau disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

b. Kemiskinan Politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat seseorang dengan kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan seseorang dalam menjangkau dan menggunakan resources.

c. Kemiskinan Sosial

Secara sosial kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam meningkatkan produktifitas. Dari aspek-aspek diatas dapat diartikan bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

### 2.1.2 Faktor-faktor Penyebab kemiskinan

Menurut (Ragner Nurkse 2016) mengungkapkan bahwa penyebab kemiskinan terjadi karena adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas juga akan rendah.

#### Faktor-faktor penyebab kemiskinan secara manusia

- a. Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, malas berpikir dan bekerja.
- b. Tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat.
- c. Pendidikan rendah.
- d. Populasi penduduk yang tinggi.
- e. Pemborosan dan kurang menghargai waktu.

#### Faktor-faktor penyebab kemiskinan secara non manusia

- a. Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit.
- b. Keterampilan atau keterisolasi desa.
- c. Sarana perhubungan tidak ada.
- d. Kurang fasilitas umum.
- e. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa.
- f. Kepemilikan tanah kurang pemerataan (tidak memiliki lahan).

### 2.1.3 Karakteristik Masyarakat Miskin

Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan. Pendapatan suatu rumah tangga dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu berusaha, bekerja, dan perolehan dari pemilikan aset. Rumah tangga miskin

biasanya tidak atau sangat sedikit memiliki aset yang dapat mendatangkan penghasilan. Sumber pendapatan yang pertama, yaitu berusaha dengan skala sangat kecil-kecil atau bekerja sebagai buruh, kedua hal inilah yang paling mungkin untuk ditingkatkan, terutama bagi mereka yang memang ingin bekerja dan berusaha.

Masyarakat miskin digolongkan menjadi dua yaitu fakir dan miskin. Fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya

Kemiskinan membuat manusia menderita dan terhambat mengembangkan kemanusiaannya. Penderitaan ini nyata dalam realitas merebaknya kasus-kasus seperti penyakit busung lapar, kekurangan gizi dan penyakit lainnya di beberapa daerah Indonesia menurut Meneth kelompok yang memiliki ketidakmampuan mengakibatkan masyarakat yang tergolong miskin berperilaku dan berpola hidup miskin, yang pada dasarnya tidak menikmati kemerdekaan untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi.

#### **2.1.4 Dampak dari Kemiskinan**

##### **a. Kriminalitas tinggi**

Dampak kemiskinan yang pertama yakni kriminalitas tinggi.

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Masyarakat

miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan.

b. Akses Pendidikan tertutup

Akses pendidikan yang tertutup merupakan dampak kemiskinan yang dapat dirasakan. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan.

c. Tingkat pengangguran tinggi

Dampak kemiskinan selanjutnya yakni dimana tingkat pengangguran semakin banyak. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya juga akan berdampak terhadap pengangguran yang semakin meningkat. Masyarakat miskin yang sulit untuk mendapatkan akses pendidikan kemudian akan berdampak terhadap tingkat pengangguran.

d. Angka kematian tinggi

Dampak kemiskinan selanjutnya yakni dimana angka kematian yang tinggi. Dampak tersebut tentunya mempunyai hubungan dengan penyebab kemiskinan yakni kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan

tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin.

### **2.1.5 Mengatasi Kemiskinan**

Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat miskin tidak selalu di pandang rendah karena mereka bisa diberdayakan. Masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan lintas sektoral dalam mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. Kebijakan-kebijakan yang diambil diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terarah yang dimaksudkan adalah pertumbuhan yang merata dan dapat “menyentuh” penduduk miskin. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus. Hal ini yang dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relatif tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dilihat dari diagram diatas menggambarkan suatu upaya yang saling terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan, karena masalah

kemiskinan harus melibatkan antar sektor dan lembaga yang terkait. Memperbaiki tingkat kesejahteraannya

Terkait dengan strategi tersebut diatas, pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan klaster masing-masing antara lain sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. PKH dapat diartikan sebagai suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu Pendidikan dan Kesehatan.

2. Program Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran sebagai akibat adanya kebijakan harga BBM. Pelaksanaan program BLT rumah tangga sasaran dalam rangka mengantisipasi krisis sebagai akibat kenaikan harga BBM diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (*sosial protection*) melalui asistensi sosial (*sosial assistensi*).

### 3. Program Sembako

Program dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden RI memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Rastra mulai ditransformasikan menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih.

Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau melalui program BPNT dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. BPNT disalurkan kepada KPM dengan menggunakan system perbankan, yang kemudia dapat digunakan untuk memperoleh beras/telur di E-warong sehingga KPM juga memperoleh gizi yang seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan pangan, maka bantuan BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas sehingga tidak hanya berupa beras dan terus seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dan dengan kandungan gizi lainnya.

### **2.1.6 Undang-Undang Tentang Bansos Dan Penanggulangan Kemiskinan**

Peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial :

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan dalam bentuk: uang, jasa, barang. Penerima bantuan sosial yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi: kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial atau ketimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Hal ini sehubungan dengan kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.

Selanjutnya, pasal 17 ayat 1 Permensos 1/2019 menyebutkan: penerima bansos sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DF PFM dan OTM kementerian sosial.

Yang dimaksud dengan DT PFM dan OTM adalah akronim dari data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu yaitu basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK. 05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (PMK 43/2020)

Keputusan Menteri Sosial Ri No 54/ Huk /2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19).

## **2.2 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa atau Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

### **2.2.1 Wewenang**

Kepala desa mempunyai wewenang:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- Mengajukan rancangan peraturan desa.

- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Membina kehidupan masyarakat desa. □

Membina perekonomian desa.

- Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### **2.2.2 Tugas**

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. □

Melaksanakan kehidupan demokrasi.

- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

- Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **2.2.3 Perangkat Desa**

Dalam struktur organisasi desa, Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas:

- Carik (Sekdes/Sekretaris) = adalah pelaksana sekretaris desa.
- Kebayan = tugasnya merupakan mengurus data-data desa.
- Lado = tugasnya merupakan dalam hal irigasi.
- Modin = tugasnya merupakan dalam hal keagamaan.
- Petengan = merupakan komandan keamanan alias komandan hansip. □

Ketua BUMDes = yang mengurus Badan Usaha Milik Desa.

- Kamituo = yang mengurus bengkok dan tanah.

#### **2.2.4 Konsep Desa**

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat.

Kata desa berasal dari bahasa sanskerta yakni *desa*, *dusun* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebut bahwa desa adalah:

1. Kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, atau dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
3. Tempat, tanah dan daerah.

#### **2.3 Program kerja**

Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012) program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut dengan program kerja.

Menurut Santosa dalam Soesanto (2011) program kerja adalah suatu system rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentan waktu yang ditentukan oleh suatu

organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Selain itu, salah satu pengertian program kerja adalah program-program yang nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi perusahaan dan organisasi.

Menurut E Hetzer (2012), setelah ditetapkannya target dan tujuan dari program, maka tindakan yang harus diambil dalam program kerja dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak operasi atau tidak, bila masih layak operasi, maka apa saja perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan, untuk menjalankan program 1 tahun kedepan.

2. Metode

Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk menjalankan program kegiatannya.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap metode dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Semangat Kerja

Seorang pimpinan harus mengetahui kondisi pengurus dan sifat bawahan mereka, sehingga seorang pimpinan mampu memberi semangat kerja pada pengurus tentang kebaikan dan system imbalan yang mencakup nilai insentif dan penilaian prestasi kerja.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti memiliki referensi dari skripsi para peneliti terdahulu yang menjadi pedoman serta dapat ditiru dalam pembuatan judul ini yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Suprizal R, Skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Berjudul: “Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas.”

Adapun kesimpulan yang di dapatkan pada penelitiannya tersebut adalah

Strategi yang telah dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan Sosial baik berupa uang Tunai maupun Non Tunai yang direalisasikan melalui program Rastra, Program Keluarga Harapan, kemudian Program Indonesia Pintar. Untuk kesehatan pemerintah memberikan bantuan dengan KIS Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemberdayaan koperasi dan peningkatan keterampilan juga menjadi strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau.

Lalu yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Rini Indah Sari skripsi mahasiswa dari Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN Makassar .dengan Judul “Analisis konsistensi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018.” Adapun kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah kriteria dalam upaya mengurangi kemiskinan yang efektif yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Prioritas utama dalam upaya mengurangi kemiskinan di lihat dari kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah program Pelayanan Air Minum Dan Sanitas Bagi Masyarakat Miskin (PANSIMAS), dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya seperti (KUBE dan BUNDES).

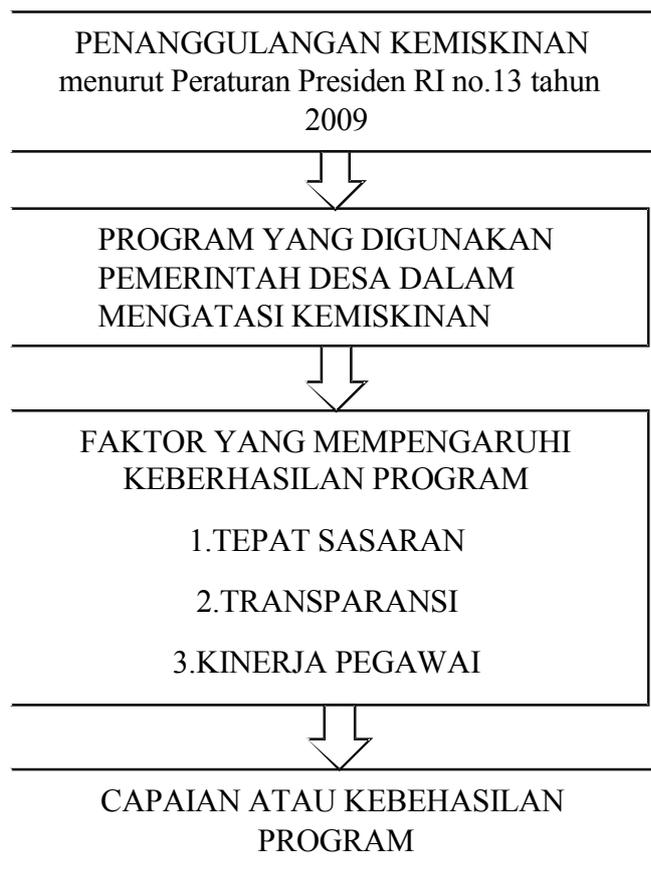
Sedangkan titik fokus pembahasan penulis adalah strategi Analisis Program Kerja Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas tentang apa saja program yang

dilakukan pemerintah Desa dalam mengurangi ataupun menuntaskan kemiskinan dimasa pandemi covid-19 di Desa Sukandebi.

Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan sipenulis adalah terletak pada program yang digunakan oleh sipenulis lebih mengarah kepada program yang dijalankan dimasa pandemi yang mana tentu memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dikarenakan situasi pandemi corona virus.

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka konseptual



**Gambar 2.1**

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu rancangan ataupun rencana yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan kemiskinan di negeri ini dengan terstruktur terkoordinasi dan dapats diharapkan menuntaskan kemiskinan di desa , kota ataupun di negara ini.

Dalam mengatasi kemiskinan pemerintah membuat program-program yang dapat diharapkan menekan angka kemiskinan dalam negeri yang dilakukan secara bertahap dan dilakukan disetiap wilayah diseluruh Indonesia termasuk desa Sukandebi. Adapun keberhasilan program ini ada dipengaruhi oleh kinerja pegawai, transparansi dari bentuk bantuan/program yang dijalankan serta tepat sasaran untuk sang penerima program bantuan dalam penanggulangan kemiskinan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada permasalahan. Metode penelitian kualitatif ada metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan maupun informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data di Desa Sukandebi, Kec.Tigalingga, Kab. Dairi yang menjadi tempat lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021

#### **3.3 Informan Penelitian**

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti di tempat penelitian yaitu:

1. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi-informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian adalah Masyarakat Desa Sukandebi.
2. Informan utama, merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sukandebi.
3. Informan Tambahan, merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dengan interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan Tambahan dalam penelitian ini adalah Aparat desa Sukandebi.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis di dalam melakukan sebuah penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Data diperoleh melalui kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara wawancara/observasi kepada informan-informan penelitian (data primer) dan data juga berasal dari bahan kepustakaan yang berupa buku, dari internet, serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder) dan data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses pelaksanaan penelitian dilakukan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

Langkah-langkah Teknik analisis data:

- Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah serta Menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* (pengertian umum) atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- Menganalisis lebih detail dengan men-*coding* data. *coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau

gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf.

- Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting* orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setingan tertentu.
- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif
- Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti, pelajaran apa yang sbisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.



